



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)**

**TAHUN
2021**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



Jl. Cut nyak dien
Pekanbaru



bkd.riau.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Riau Tahun 2019 dan Capaian Renstra BKD Provinsi Riau	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan.....	18
2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	18
2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)	21
2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	22
2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan	

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	22
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.1.1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia	29
3.1.2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	30
3.1.3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	31
3.1.4. Komisi Aparatur Sipil Negara	31
3.1.5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
3.3. Program dan Kegiatan	34
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	38
BAB V : PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Provinsi Riau	6
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	17
Tabel 2.3 Pemetaan Permasalahan dan Hambatan	18
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Provinsi Riau	24
Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2021	34
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Riau	35
Tabel 4.1 Rumusan Rencana dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2021	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renja SKPD	2
Gambar 1.2. Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKD , Renstra Perangkat Daerah dengan Renja ...	2

BAB I

PENDAHULUAN

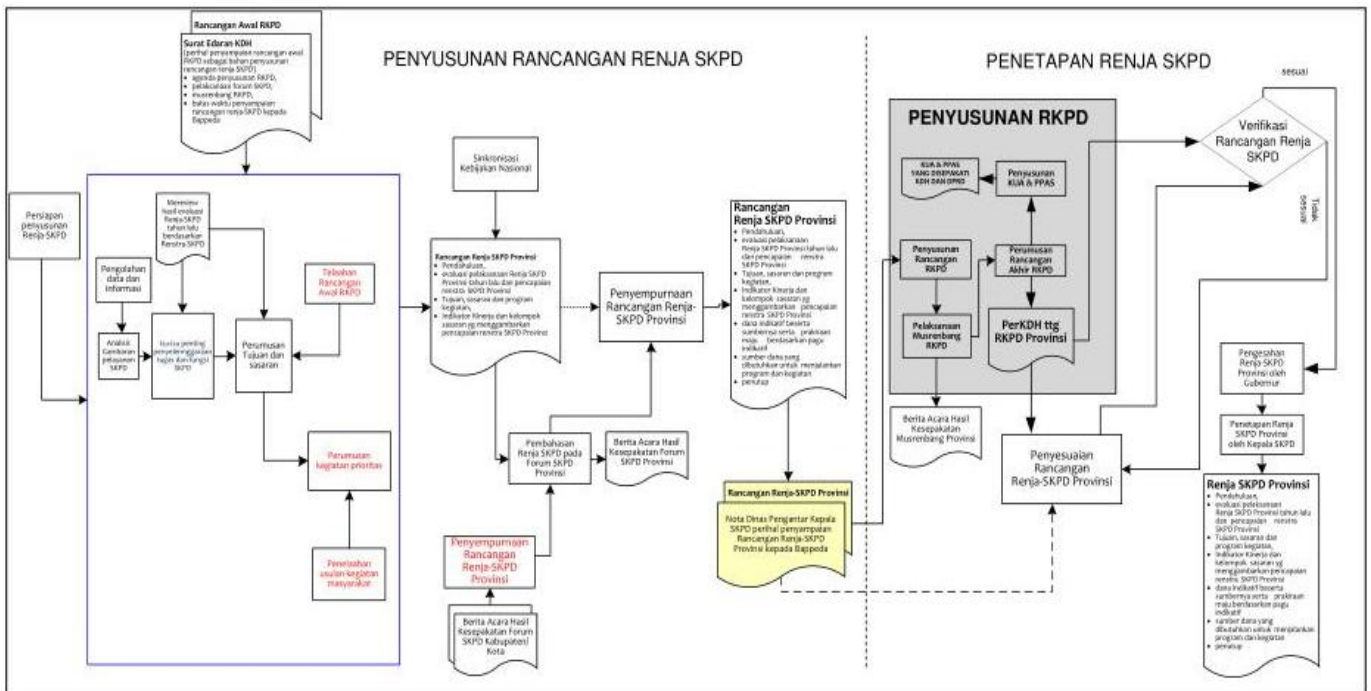
1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah ini juga merupakan sebuah dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

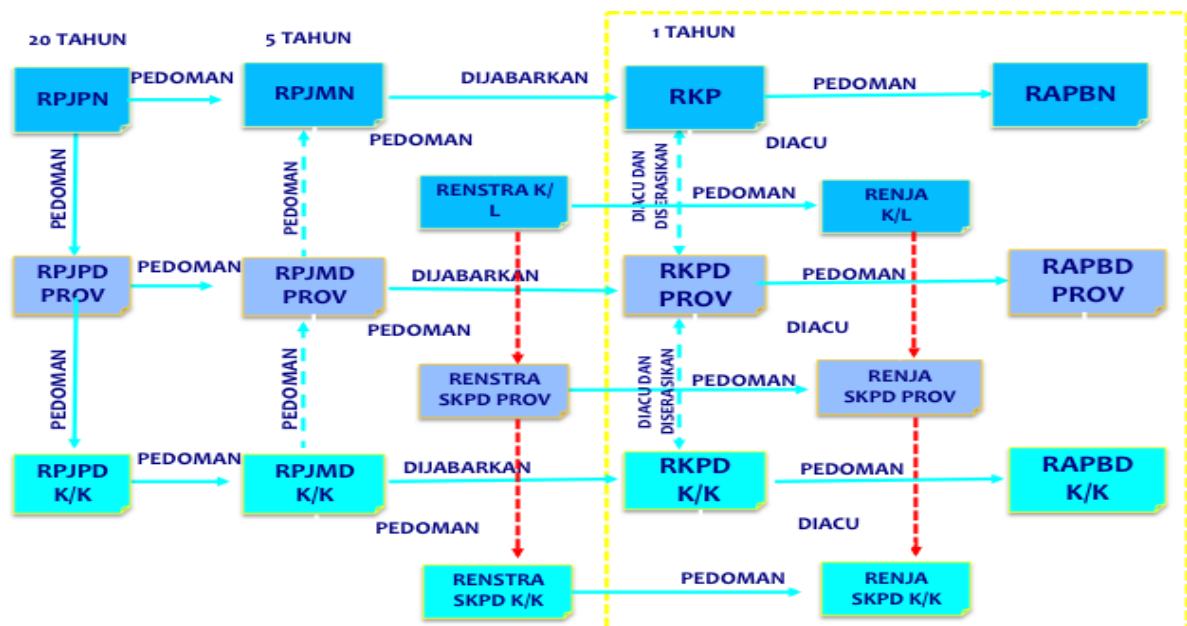
Renja Perangkat Daerah disusun dengan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
- c. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
- d. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
- e. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD; dan
- f. Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Tahapan Penyusunan Renja SKPD



keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD , Renstra
Perangkat Daerah dengan Renja



Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan

pembangunan jangka menengah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 telah mengamanatkan kepada Badan Kepegawaian Daerah sebagai perangkat daerah yang mengemban urusan pemerintahan penunjang urusan yaitu kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

RPJMD sebagai perencanaan pembangunan daerah telah ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya, perencanaan perangkat daerah 5 tahunan sebagaimana terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan yang bersifat lebih teknis dan operasional dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Berdasarkan hal tersebut di atas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada tahun 2020 menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Dalam prosesnya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau. Bappedalitbang melakukan verifikasi terhadap dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah agar dapat dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.

Setelah melalui proses verifikasi, Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Riau Tahun 2021.

1.1. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemeirntah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);
- 12) Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);

- 13) Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 76);
- 14) Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 44);
- 15) Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rancangan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Provinsi Riau di tahun 2021 melalui perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan dari penyusunan rancangan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 adalah :

- 1) Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2021;
- 2) Sebagai instrumen evaluasi akuntabilitas kinerja di tahun 2021 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2021 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dengan subbab sebagai berikut:

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah

dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian renstra perangkat daerah, analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dengan subansi bab sebagai berikut.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Provinsi Riau Tahun 2019 dan Capaian Renstra BKD Provinsi Riau

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Penyusunan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau haruslah memperhatikan capaian rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada realisasi APBD Tahun 2019 dan Tahun 2020, yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya. Pencapaian rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau juga harus memperhatikan sasaran dan target program kegiatan yang telah disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat tercapai.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019. Laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah memuat capaian terhadap target sasaran strategis, program dan kegiatan serta capaian realisasi anggaran pada masing – masing program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja ini merupakan wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang kepegawaian. Selain itu, Evaluasi pelaksanaan rencana kerja juga menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk penyusunan perencanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 sampai dengan tahun berjalan (2020) disajikan dalam format T-C.29 pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Provinsi Riau

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 s/d 2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.00.	PENUNJANG URUSAN									
3.0.03.01.0.0.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
3.0.03.01.0.0.00.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	16.400 surat	17.644 surat	2.500 surat	2.424 surat	97			
3.0.03.01.0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	60 bulan	26 bulan	12 bulan	12 bulan	100			
3.0.03.01.0.0.00.01.003.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	422 unit	649 unit	23 unit	23 unit	100			
3.0.03.01.0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	60 bulan	26 bulan	12 bulan	12 bulan	100			
3.0.03.01.0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	95 unit	60 unit	14 unit	14 unit	100			
3.0.03.01.0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang waktu penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	26 bulan	12 bulan	12 bulan	100			
3.0.03.01.0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rentang waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	26 bulan	12 bulan	12 bulan	100			
3.0.03.01.0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang waktu penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor	60 bulan	1.908 bulan	12 bulan	12 bulan	100			
3.0.03.01.0.0.00.01.010.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	53.308 orang	38.198 orang	6.400 orang	6.860 orang	107			
3.0.03.01.0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	610 Kali	135 Kali	120 Kali	131 Kali	109			
3.0.03.01.0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa administrasi kantor	12 bulan	- bulan	12 bulan	12 bulan	100			
3.0.03.01.0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga keamanan untuk pelaksanaan pengamanan kantor	92 bulan	83 bulan	12 bulan	12 bulan	100			
3.0.03.01.0.0.00.01.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan	26 bulan	12 bulan	12 bulan	100			
3.0.03.01.0.0.00.01.016.	Penyediaan Jasa Sosialisasi, Informasi, Publikasi dan Kehumasan SKPD	Rentan pengelolaan sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan BKD	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 s/d 2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.0.03.01.0.0.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
3.0.03.01.0.0.00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang dilakukan BKD	-	9 unit	2 unit	2 unit	100			
3.0.03.01.0.0.00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	288 unit	362 unit	228 unit	228 unit	100			
3.0.03.01.0.0.00.02.017.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	3.040 unit	1.589 unit	230 unit	228 unit	99			
3.0.03.01.0.0.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
3.0.03.01.0.0.00.03.006	Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah Pegawai Negeri Sipil BKD yang terbina fisik dan mental aparatur	500 orang	591 unit	135 unit	135 unit	100			
3.0.03.01.0.0.00.03.016	Pelaksanaan Konseling Psikologi Permasalahan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti konseling psikologi	750 orang	330 unit	75 unit	75 unit	100			
3.0.03.01.0.0.00.05.	Program Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur									
3.0.03.01.0.0.00.05.001	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS BKD Provinsi Riau yang mengikuti pendidikan, pelatihan, kursus dan bimtek	26 orang	-	26 orang	26 orang	100			
3.00.03	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
3.0.03.01.3.0.03.15.	Program Pendidikan Kedinasan									
3.0.03.01.3.0.03.15.008.	Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima Beasiswa tugas belajar	176 orang	117 orang	39 orang	39 orang	100			
3.0.03.01.3.0.03.15.009.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	6 orang	3 orang	1 orang	2 orang	200			
3.0.03.01.3.0.03.15.010.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	39 orang	23 orang	3 orang	1 orang	33			
3.0.03.01.3.0.03.15.016.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah Calon PNS yang mengikuti Pendidikan Kedinasan	284 orang	49 orang	55 orang	54 orang	98			
3.0.03.01.3.0.03.16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur									
3.0.03.01.3.0.03.16.050.	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau	Jumlah asesor Provinsi Riau yang mengikuti peningkatan kapasitas	- Orang	13 Orang	22 Orang	22 Orang	100			
3.0.03.01.3.0.03.16.068.	PORNAS Korpri	Jumlah peserta PORNAS KORPRI Provinsi Riau	50 orang	- orang	32 orang	32 orang	100			
3.0.03.01.3.0.03.16.072.	Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI	Jumlah kegiatan penyelenggaraan upacara HUT KORPRI	3.000 orang	2 orang	1 orang	1 orang	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 s/d 2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.0.03.01.3.0.03.16.073.	Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI Yang Meninggal	Jumlah Persemayaman dan Pemakaman Anggota KORPRI yang dilaksanakan	30 kali	- kali	20 kali	4 kali	20			
3.0.03.01.3.0.03.16.080.	Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Fungsional Tertentu yang terfasilitasi mengikuti Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	10 orang	30 orang	39 orang	39 orang	100			
3.0.03.01.3.0.03.16.081.	Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terfasilitasi mengikuti Diklat Teknis bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau pegawai Pemerintah Provinsi Riau	10 orang	- orang	24 orang	24 orang	100			
3.0.03.01.3.0.03.17.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur									
3.0.03.01.3.0.03.17.031.	Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima Satya Lencanakarya Satya	294 orang	2.001 orang	1.000 orang	1.026 orang	103			
3.0.03.01.3.0.03.17.035.	Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau	Hasil monitoring PNS yang menerima TAPETARUM dan Jumlah PNS yang menerima TASPEN	4 dokumen	4 dokumen	500 dokumen	499 dokumen	100			
3.0.03.01.3.0.03.17.066.	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011	Hasil data SKP Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten/kota yang di monitoring	5 dokumen	4 dokumen	16.737 dokumen	16.238 dokumen	97			
3.0.03.01.3.0.03.17.068.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah pengadaan Pegawai Negeri Sipil terlaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi yang ada	1.086 orang	862 orang	250 orang	110 orang	44			
3.0.03.01.3.0.03.17.070.	Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	jumlah Pegawai negeri sipil yang mengikuti ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	1.640 orang	1.589 orang	200 orang	200 orang	100			
3.0.03.01.3.0.03.17.075.	Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian (e-document)	Jumlah dokumen yang terpelihara	13.000 dokumen	9.495 dokumen	7.000 dokumen	7.589 dokumen	108			
3.0.03.01.3.0.03.17.076.	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah dokumen data kepegawaian yang dikelola	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100			
3.0.03.01.3.0.03.17.087.	Pemantauan disiplin PNS	Pemantauan disiplin PNS	2 dokumen	- dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100			
3.0.03.01.3.0.03.17.088.	Penanganan Kasus kasus kepegawaian	Penanganan kasus-kasus kepegawaian	120 Kasus	- Kasus	80 Kasus	80 Kasus	100			
3.0.03.01.3.0.03.17.109.	Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan	Hasil Monitoring Evaluasi Program dan Kegiatan 12 Kabupaten Kota	4 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
3.0.03.01.3.0.03.17.114.	Pengembangan E-vernment Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat untuk e-government Manajemen Kepegawaian Provinis Riau	15 Aplikasi	2 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100			
3.0.03.01.3.0.03.17.115.	Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau	jumlah jabatan tinggi yang terseleksi melalui uji kompetensi	101 orang	67 orang	34 orang	34 orang	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 s/d 2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.0.03.01.3.0.03.17.137.	Penyusunan Standar Kompetensi Provinsi Riau	Jumlah standar kompetensi jabatan ASN yang disusun	- Jabatan	- Jabatan	1.200 Jabatan	1.180 Jabatan	98			
3.0.03.01.3.0.03.18.	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara									
3.0.03.01.3.0.03.18.001.	Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS	Jumlah penataan pindah tugas PNS yang terkelola	1.100 orang	25.194 orang	1.500 orang	1.455 orang	97			
3.0.03.01.3.0.03.18.006.	Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kab/kota se Provinsi Riau	Pengelolaan kenaikan pangkat PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	16.460 orang	11.832 orang	4.000 orang	5.991 orang	150			
3.0.03.01.3.0.03.18.008.	Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Surat Keputusan Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemda Provinsi Riau yang terkelola	11.890 SK	5.819 SK	1.100 SK	1.640 SK	149			
3.0.03.01.3.0.03.18.011.	Pengelolaan Administrasi kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1.160 berkas	5.729 berkas	350 berkas	266 berkas	76			
3.0.03.01.3.0.03.18.013.	Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau	Jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang disusun untuk diusulkan	1.336 Formasi PNS	62 Formasi PNS	250 Formasi PNS	250 Formasi PNS	100			
3.0.03.01.3.0.03.18.017.	Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintahan Provinsi Riau yang ditempatkan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya	7.095 Orang	2.960 Orang	500 Orang	497 Orang	99			
3.0.03.01.3.0.03.18.022.	Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik	jumlah Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik yang tersusun dan terkelola	452 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100			
3.0.03.01.3.0.03.18.023.	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	300 SK	58 SK	50 SK	50 SK	100			
3.0.03.01.3.0.03.18.025.	Penyelenggaraan Verifikasi Usulan Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau dan Kab/Kota se-Provinsi Riau	jumlah Dokumen Verifikasi usulan kenaikan pangkat	8.000 berkas	5.882 berkas	4.000 berkas	5.991 berkas	150			
3.0.03.01.3.0.03.18.026.	Pengelolaan Administrasi Penggunaan Gelar PNS Pemerintah Provinsi Riau	jumlah PNS yang mengusulkan usulan gelar	100 orang	109 orang	50 orang	67 orang	134			
3.0.03.01.3.0.03.18.029.	Sistem Aplikasi Penatausahaan BKD Provinsi Riau	Jumlah sistem aplikasi penatausahaan yang dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100			
3.0.03.01.3.0.03.19.	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur									
3.0.03.01.3.0.03.19.002.	Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS	Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS Memasuki Masa Pensiun	400 Orang	320 Orang	100 Orang	100 Orang	100			
3.0.03.01.3.0.03.19.005.	Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah SK pensiun PNS yang terselesaikan	1.455 Sk	904 Sk	500 Sk	220 Sk	44			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 s/d 2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
EVALUASI RENJA BERDASARKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 S/D 2024										
0.0.00.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
0.0.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim						2500	Surat	1247 9.98
0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar						24	Rekening	12 10
0.0.00.01.003.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan						10	Unit	107 133,75
0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor						12	Bulan	6 10
0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara						14	Unit	11 15,71
0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan						20	Jenis	25 20,83
0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan						25	Jenis	50 28,57
0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan						31	Jenis	19 12,26
0.0.00.01.010.	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan						6400	Porsi	2744 8.42
0.0.00.01.011.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah						130	Kali	34 4
0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan						2220	OB	1010 9.1
0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan						276	OB	130 9.42
0.0.00.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR									
0.0.00.02.012.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara						2	Ruang	0 0
0.0.00.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara						300	Unit	184 12,27
0.0.00.03.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR									
0.0.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan						135	Stel	0 0
0.0.00.03.003.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan						135	Stel	0 0
3.0.03.15.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA									
3.0.03.15.001.	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN	Jumlah dokumen						2	Dokumen	0 0
3.0.03.15.002.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update						2500	Data Elektronik	1456 11,65
3.0.03.15.003.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang direkrut						350	Orang	350 20
3.0.03.15.004.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah mahasiswa ikatan dinas yang difasilitasi						126	Orang	93 14,76

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 s/d 2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.0.03.15.005.	Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang difasilitasi						200 Orang	0	0
3.0.03.15.007.	Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi	Jumlah dokumen penataan						1 Dokumen	0	0
3.0.03.15.008.	Pengelolaan Penataan PNS Pindah Tugas	Jumlah dokumen laporan penataan PNS pindah tugas						1 Dokumen	0	0
3.0.03.15.009.	Penyusunan Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi	Jumlah dokumen analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi yang tersusun						1 Dokumen	0	0
3.0.03.15.010.	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau	Jumlah dokumen pengelolaan dan evaluasi JFT						2 Dokumen	1	10
3.0.03.15.011.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah dokumen seleksi jabatan pimpinan tinggi						1 Dokumen	0	0
3.0.03.15.012.	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan						2 Modul	0	0
3.0.03.15.013.	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah integrasi sistem dan jaringan yang dikelola						1 Modul	0	0
3.0.03.15.015.	Pengelolaan Akreditasi UPT Penilaian Kompetensi	Jumlah sertifikat akreditasi UPT penilaian kompetensi Provinsi Riau						Sertifikat 1 Akreditasi	0	0
3.0.03.15.016.	Pengelolaan Identitas dan Izin Kepegawaian	Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin kepegawaiannya						350 Orang	449	25,66
3.0.03.15.017.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat dan Penggunaan Gelar ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota Se- Provinsi Riau	Jumlah berkas ASN yang dikelola						4000 Berkas	3132	15,66
3.0.03.15.018.	Pengelolaan Pensiun PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi						600 Orang	302	10,07
3.0.03.15.019.	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya						1000 Orang	0	0
3.0.03.15.020.	Pengelolaan (LHKPN) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola						359 Dokumen	0	0
3.0.03.15.021.	Penanganan Kasus-Kasus Kepegawaian dan Bantuan Hukum	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani						70 Kasus	22	6,29
3.0.03.17.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR									
3.0.03.17.001.	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen						2 Dokumen	1	10
3.0.03.17.002.	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau	Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan						1 Dokumen	0	0
3.0.03.17.003.	Pemetaan Jabatan, Evaluasi dan Penyusunan Talent Pool ASN Provinsi Riau	Jumlah dokumen pemetaan, evaluasi dan talent pool						2 Dokumen	0	0
3.0.03.17.005.	Pemberian Beasiswa Tugas Belajar	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti tugas belajar						33 Orang	25	8,87

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 s/d 2019)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.0.03.17.006.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional Tk I						1 Orang	0	0
3.0.03.17.007.	Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional Tk II						4 Orang	0	0
3.0.03.17.008.	Diklat Fungsional Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengiktui diklat fungsional						10 Orang	3	1,83
3.0.03.17.009.	Diklat Teknis Pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis						10 Orang	2	1,05
3.0.03.17.011.	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Asesor Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assesor						20 Orang	18	18
3.0.03.17.012.	Pelaksanaan Magang/Praktik Kerja	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan praktik kerja						5 Orang	0	0
3.0.03.17.013.	Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah ASN yang dikonseling						42 Orang	0	0
3.0.03.17.014.	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN						12 Kali	0	0
3.0.03.17.015.	Pembangunan Database Terkait Pelanggaran Disiplin, Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah database yang dibangun terkait pelanggaran kode etik dan kode perilaku						1 Data Base	0	0
3.0.03.17.016.	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan Berkinerja Baik	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan						5 Orang	0	0
3.0.03.17.017.	Pembinaan KORPRI Provinsi Riau	Jumlah agenda pembinaan KORPRI						5 Agenda	0	

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat program dan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Konsistensi pelaksanaan kegiatan;
- b. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan kegiatan;
- c. Koordinasi yang baik antar stakeholder baik internal maupun external BKD.

Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat mencapai target secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Adanya rasionalisasi anggaran;
- b. Adanya kegiatan yang tidak dijalankan karena kebijakan daerah;
- c. Adanya perubahan target kinerja terhadap kegiatan.

Implikasi yang ditimbulkan dengan tidak tercapainya target program dan kegiatan akan mempengaruhi capaian indikator kinerja yang telah dituangkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sehingga berdampak lambatnya pencapaian tujuan dan sasaran perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. Memperhatikan kondisi tersebut, kebijakan yang diambil oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kegiatan yang tepat sasaran;
- b. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran;
- c. Penetapan kegiatan yang strategis guna mendukung capaian tujuan sasaran kinerja perangkat daerah;
- d. Penetapan target indikator kinerja yang lebih terukur;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang

Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi, Bidang Pengembangan Aparatur dan Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan serta UPT. Penilaian Kompetensi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di atas, sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah melalui peningkatan manajemen pelayanan ASN serta pembinaan dan pengembangan ASN. Adapun indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagaimana terdapat dalam dokumen Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah:

- a. Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya
- b. Presentase penetapan ASN dalam jabatan
- c. Persentase menurunnya pelanggaran disiplin
- d. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 yang telah diterjemahkan ke dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Dalam dokumen perencanaan lima tahunan ini telah disusun indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yaitu:

- a. Indeks Profesionalitas ASN
- b. Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian; dan
- c. Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik;

Capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan di dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau disajikan dalam format T-C.30 pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Renstra BKD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019											
1	Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya			2 %				1,69 %				
2	Presentase penetapan ASN dalam jabatan			10 %				72 %				
3	Persentase menurunnya pelanggaran disiplin			35 %				25,42 %				
4	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			B				B				
II	Renstra BKD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024											
1	Indeks Profesionalisme ASN Provinsi Riau				45 %	50 %	55 %	47,84 %	-	-	-	
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian				65 (B)	66 (B)	67 (B)	66 (B)	-	-	-	
3	Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik				70 %	75 %	80 %	87,74 %	-	-	-	

Catatan :

Kriteria Nilai Indeks Profesionalitas ASN

91-100 Sangat Tinggi
81-90 Tinggi
71-80 Sedang
61-70 Rendah
≤60 Sangat Rendah

Kriteria Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

88,31-100 Sangat Baik
76,61-88,30 Baik
65,00-76,60 Kurang Baik
25,00-64,99 Tidak Baik

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Didalam melaksanakan kinerjanya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yang berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah. Oleh karena itu diharapkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dapat menyelesaikan tantangan tersebut dengan meningkatkan kinerja melalui peluang-peluang yang ada dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yaitu:

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

Dalam meningkat kinerja pelayanan Pada tahun 2019 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau memiliki 4 (empat) indikator kinerja yang harus dicapai diantaranya :

- 1) Presentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya dengan;
- 2) Presentase penetapan ASN dalam jabatan;
- 3) Persentase menurunnya pelanggaran disiplin;
- 4) Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.3.
Pemetaan Permasalahan dan Hambatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Hambatan
1	2	3	4
1.	Belum meningkatnya Manajemen Pelayanan ASN	1. Belum optimalnya perencanaan kebutuhan;	1. Belum tersedianya data pegawai yang akan pensiun dalam jangka menengah (5 tahun) 2. Belum tersedianya data pegawai secara real time dan lengkap 3. Belum tersedianya perencanaan kebutuhan jangka menengah pegawai selama 5 tahun

No	Masalah Pokok	Masalah	Hambatan
1	2	3	4
		2. Belum adanya kesesuaian antara pengadaan pegawai dengan kebutuhan;	1. Belum dilaksanakan penerimaan PPPK/pengalihan PNS dari instansi lain pada tahun terakhir dilakukan secara terbuka dan kompetiti 2. Belum optimalnya penyusunan ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan 3. Belum adanya kebijakan internal pergub terkait pengadaan ASN 4. Belum Optimalnya penempatan PNS yang sesuai jabatan yang dilamar
		3. Belum optimalnya promosi, mutasi dan rotasi;	1. Belum adanya kebijakan internal pergub tentang pola karier 2. Belum adanya kebijakan internal pergub tentang mutasi, rotasi dan promosi dengan mengacu kepada rencana suksesi 3. Belum dilaksanakan mutasi, rotasi dan promosi ke JPT, Administrator dan Pengawas secara terbuka dan kompetitif
		4. Belum optimalnya sistem pendukung;	1. Belum comprehensivenya Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai. 2. Belum Optimalnya penguatan & penggunaan asesment center dalam pemetaan kompetensi pengisian jabatan
		5. Belum optimalnya perlindungan dan pemberian	1. Kurangnya komitmen dan perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan dan pemberian kemudahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Hambatan
1	2	3	4
		kemudahan	pegawai dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun 2. Belum maksimalnya pelayanan administrasi kepegawaian
2.	Belum meningkatnya Pembinaan dan Disiplin ASN	1. Belum optimalnya manajemen kinerja; 2. Belum optimalnya pembinaan karir dan peningkatan kompetensi;	1. Belum adanya kebijakan penggunaan hasil penilaian kinerja bagi penentuan keputusan manajemen terkait pembinaan dan pengembangan karier (promosi, mutasi, demosi, rotasi, diklat) 2. Belum dilakukan analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaiannya 3. Belum dilaksanakannya penilaian kinerja secara berkala untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja 4. Belum Optimalnya Penerapan metode penilaian kinerja yang obyektif dan terukur 1. Belum disusunnya talent pool dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir 2. Belum disusunnya analisis tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai 3. Belum disusunnya analisis kesenjangan kinerja 4. Belum adanya strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN 5. Belum optimalnya fasilitasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Hambatan
1	2	3	4
			diklat yang dalam rangka mengatasi kesenjangan 6. Belum ada peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai 7. Belum adanya peningkatan kompetensi melalui coaching, counseling dan mentoring
		3. Belum optimalnya penggajian, penghargaan dan disiplin;	1. Masih kurangnya penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya 2. Belum Optimalnya pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai 3. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan internal untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial kepada pegawai berprestasi dan berkinerja baik

Sumber: FGD BKD, 2018

Permasalahan sebagaimana tersebut di atas telah diidentifikasi pada dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Permasalahan – permasalahan tersebut telah dilakukan analisis secara mendalam dan menghasilkan rumusan kebijakan yang terdiri atas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan selam lima tahun ke depan.

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals)

Dampak yang ditimbulkan dari permasalahan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah tidak tercapainya visi Kepala Daerah yang kelima yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi”***. yang bertujuan meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik dengan sasaran:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, dengan indikator sasaran: Indeks reformasi birokrasi
2. Meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi, dengan indikator sasaran: Sistem pemerintahan berbasis elektronik .

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Peluang yang diharapkan dalam meningkatkan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau diantaranya :

1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum maksimal;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara;
4. Kemajuan teknologi informasi atau elektronik government (e.government) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah :

1. Sistem Merit;
2. Pengadaan PNS;
3. Pengembangan Karier;
4. Gaji dan Perlindungan;
5. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Kelembagaan;
7. Penetapan Pegawai sesuai dengan kompetensinya

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merumuskan beberapa program yang akan dilaksanakan pada rencana kerja tahunan diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara ; dan
2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur.

Program-program tersebut didukung oleh kegiatan dengan tujuan mencapai kinerja organisasi dan visi misi Kepala Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rumusan usulan program dan kegiatan yang dituangkan dalam rancangan awal RKPD adalah suatu tahapan yang digunakan bagi Perangkat Daerah untuk memuat kebutuhan rencana kerja yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya. Tahapan penyusunan rencana kerja ini melalui proses penyandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penjelasan mengenai analisa kebutuhan rencana kerja perangkat daerah tersebut dilakukan apabila adanya temuan-temuan rencana kerja perangkat daerah yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Adapun kondisi yang ditemukan pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2021 dengan membandingkannya dengan analisis kebutuhan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dapat dirumuskan sebagai berikut

- a. Antara Rancangan Awal RKPD dan analisis kebutuhan tidak terdapat usulan kegiatan baru;
- b. Pagu perangkat daerah dan sebarannya pada tiap – tiap kegiatan sebagaimana terdapat pada Rancangan Awal RKPD belum sesuai dengan analisis kebutuhan perangkat daerah.
- c. Beberapa kegiatan pada Rancangan Awal RKPD masih memiliki target terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pagu indikatif yang diberikan sehingga dapat diperkirakan tidak akan tercapai dengan pagu dimaksud.

Selanjutnya, review terhadap Rancangan Awal RKPD dengan kebutuhan BKD Provinsi Riau Tahun 2021 telah dirumuskan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Provinsi Riau

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100%	6.032.721.591	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	100%	6.257.216.028	
01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat yang dikirim	2.500 Surat	14.776.665	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat yang dikirim	2.500 Surat	14.776.650	
01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Rekening Yang Dibayar	24 Rekening	1.052.662.317	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Rekening Yang Dibayar	24 Rekening	1.052.662.317	
01.003.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Unit	226.344.366	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Unit	251.050.000	
01.004.	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	801.852.317	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	801.852.317	
01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional		Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	196.344.366	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional		Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 Unit	196.344.366	
01.007.	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang disediakan	25 Jenis	162.211.266	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang disediakan	25 Jenis	162.211.266	
01.008.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Jenis Laporan Yang Dicetak dan Digandakan	25 Jenis	144.857.616	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Jenis Laporan Yang Dicetak dan Digandakan	25 Jenis	144.857.616	
01.009.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	31 Jenis	97.036.166	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	31 Jenis	97.036.166	
01.010.	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	6.400 Porsi	191.359.366	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	6.400 Porsi	191.359.366	
01.011.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar DaerahFrekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	160 Kali	851.852.317	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar DaerahFrekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	160 Kali	937.037.549	
01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor		Rentang waktu penyediaan jasa administrasi kantor	2.220 Orang Bulan	1.500.836.415	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor		Rentang waktu penyediaan jasa administrasi kantor	2.220 Orang Bulan	1.615.440.000	
01.013.	Penyediaan jasa keamanan kantor		Jumlah tenaga satpam yang disediakan	276 Orang Bulan	792.588.415	Penyediaan jasa keamanan kantor		Jumlah tenaga satpam yang disediakan	276 Orang Bulan	792.588.415	
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100%	844.240.701	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100%	800.000.000	
02.012.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	2 Ruang	644.240.701	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	2 Ruang	600.000.000	
02.016.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	300 Unit	200.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	300 Unit	200.000.000	
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	100%	253.272.210	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	100%	243.600.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	135 Orang	122.072.210	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	135 Orang	121.800.000	
03.003.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	135 Orang	131.200.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	135 Orang	121.800.000	
015	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara		Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan	100%	3.895.608.171	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara		Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan	100%	6.155.086.207	
15.001.	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN		Jumlah Dokumen Renstra Pengadaan Kebutuhan ASN Provinsi Riau	1 Dokumen	126.166.733	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN		Jumlah Dokumen Renstra Pengadaan Kebutuhan ASN Provinsi Riau	1 Dokumen	126.166.733	
15.002.	Pengelolaan data kepegawaian		Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update	2.500 Data Elektronik	99.835.580	Pengelolaan data kepegawaian		Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update	2.500 Data Elektronik	99.835.580	
15.003.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara		Jumlah ASN yang direkrut	350 Orang	300.000.000	Pengadaan Aparatur Sipil Negara		Jumlah ASN yang direkrut	350 Orang	1.643.955.897	
15.004.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas		Jumlah mahasiswa Ikatan Dinas yang difasilitasi	126 Orang	300.000.000	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas		Jumlah mahasiswa Ikatan Dinas yang difasilitasi	126 Orang	300.000.000	
15.005.	Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah		Jumlah ASN yang difasilitasi	200 Orang	80.000.000	Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah		Jumlah ASN yang difasilitasi	200 Orang	98.017.699	
15.007.	Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi		Jumlah dokumen penataan PNS	1 Dokumen	307.591.507	Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi		Jumlah dokumen penataan PNS	1 Dokumen	382.341.507	
15.008.	Pengelolaan penataan PNS Pindah Tugas		Jumlah Dokumen Laporan Penataan PNS Pindah Tugas	1 Dokumen	160.628.502	Pengelolaan penataan PNS Pindah Tugas		Jumlah Dokumen Laporan Penataan PNS Pindah Tugas	1 Dokumen	347.088.502	
15.009.	Penyusunan analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi		Jumlah Dokumen Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi yang tersusun	1 Dokumen	70.000.000	Penyusunan analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi		Jumlah Dokumen Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi yang tersusun	1 Dokumen	173.328.000	
15.010.	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau		Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Evaluasi JFT	2 Dokumen	350.000.000	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau		Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Evaluasi JFT	2 Dokumen	700.000.000	
15.011.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		Jumlah Dokumen seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	1 Dokumen	200.000.000	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		Jumlah Dokumen seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	1 Dokumen	199.999.940	
15.012.	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau		Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan	1 Sistem/Aplikasi/Modul	200.000.000	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau		Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan	1 Sistem/Aplikasi/Modul	200.000.000	
15.013.	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian		Jumlah Integrasi Sistem dan Jaringan yang dikelola	1 Modul	120.000.000	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian		Jumlah Integrasi Sistem dan Jaringan yang dikelola	1 Modul	120.000.000	
15.014.	Pengembangan Sistem Penilaian Kompetensi Provinsi Riau		Jumlah modul sistem penilaian kompetensi Provinsi Riau yang dikembangkan	1 Modul	150.000.000	Pengembangan Sistem Penilaian Kompetensi Provinsi Riau		Jumlah modul sistem penilaian kompetensi Provinsi Riau yang dikembangkan	1 Modul	150.000.000	
15.016.	Pengelolaan Identitas dan Izin Kepegawaian		Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin kepegawaian	350 Orang	150.000.000	Pengelolaan Identitas dan Izin Kepegawaian		Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin kepegawaian	350 Orang	150.000.000	
15.017.	Pengelolaan kenaikan pangkat dan Penggunaan Gelar ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau		Jumlah berkas ASN yang dikelola	4000 Berkas	624.555.000	Pengelolaan kenaikan pangkat dan Penggunaan Gelar ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau		Jumlah berkas ASN yang dikelola	4000 Berkas	764.900.000	
15.018.	Pengelolaan pensiun PNS		Jumlah PNS yang difasilitasi	600 Orang	300.000.000	Pengelolaan pensiun PNS		Jumlah PNS yang difasilitasi	600 Orang	342.621.500	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.019.	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya		Jumlah PNS yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	1.000 Orang	100.000.000	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya		Jumlah PNS yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	1.000 Orang	100.000.000	
15.020.	Pengelolaan (LHKPN) pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau		Jumlah Dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola	359 Dokumen	106.830.849	Pengelolaan (LHKPN) pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau		Jumlah Dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola	359 Dokumen	106.830.849	
15.021.	Penanganan kasus - kasus kepegawaian dan Bantuan Hukum		Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	70 Kasus	150.000.000	Penanganan kasus - kasus kepegawaian dan Bantuan Hukum		Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	70 Kasus	150.000.000	
017	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		Persentase Jumlah Penataan Pengembangan Manajemen ASN Yang Profesional	100%	5.928.120.086	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		Persentase Jumlah Penataan Pengembangan Manajemen ASN Yang Profesional	100%	9.898.339.522	
17.001.	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau		Jumlah dokumen	2 Dokumen	70.000.000	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau		Jumlah dokumen	2 Dokumen	70.000.000	
17.002.	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau		Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau		Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan	1 Dokumen	100.000.000	
17.003.	Pemetaan Jabatan, Evaluasi dan Penyusunan Talent Pool ASN Provinsi Riau		Jumlah Dokumen Pemetaan, Evaluasi dan Talent Pool	2 Dokumen	150.000.000	Pemetaan Jabatan, Evaluasi dan Penyusunan Talent Pool ASN Provinsi Riau		Jumlah Dokumen Pemetaan, Evaluasi dan Talent Pool	2 Dokumen	149.999.860	
17.004.	Penyusunan Strategi Peningkatan Kompetensi		Jumlah dokumen strategi program dan kegiatan Peningkatan Kompetensi	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Strategi Peningkatan Kompetensi		Jumlah dokumen strategi program dan kegiatan Peningkatan Kompetensi	1 Dokumen	220.500.000	
17.005.	Pemberian beasiswa tugas belajar		Jumlah PNS yang Terfasilitasi Mengikuti Tugas Belajar	33 Orang	3.400.000.000	Pemberian beasiswa tugas belajar		Jumlah PNS yang Terfasilitasi Mengikuti Tugas Belajar	33 Orang	4.562.530.676	
17.006.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk I	1 Orang	81.483.600	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk I	1 Orang	186.404.110	
17.007.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II)		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	6 Orang	250.000.000	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II)		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	6 Orang	893.467.394	
17.008.	Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Fungsional	40 Orang	250.000.000	Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Fungsional	40 Orang	602.421.054	
17.009.	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	45 Orang	222.693.386	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau		Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	45 Orang	713.920.945	
17.010.	Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)		Jumlah PNS yang terseleksi mengikuti Diklat PIM Tk. II, III, dan IV	50 Orang	150.000.000	Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)		Jumlah PNS yang terseleksi mengikuti Diklat PIM Tk. II, III, dan IV	50 Orang	284.673.226	
17.011.	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau		Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assessor	20 Orang	246.808.000	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau		Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assessor	20 Orang	246.808.000	
17.012.	Pelaksanaan magang/praktik kerja		Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan prktik kerja	7 Orang	200.000.000	Pelaksanaan magang/praktik kerja		Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan prktik kerja	7 Orang	281.593.703	
17.013	Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau		Jumlah ASN yang dikonseling	80 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau		Jumlah ASN yang dikonseling	80 Orang	123.809.934	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.014.	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN		Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	12 Kali	107.135.100	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN		Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN	12 Kali	107.135.100	
17.016	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan berkinerja baik		Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan	22 Orang	400.000.000	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan berkinerja baik		Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan	22 Orang	400.000.000	
17.017.	Pembinaan KORPRI Provinsi Riau		Jumlah Agenda Pembinaan KORPRI	5 Agenda	100.000.000	Pembinaan KORPRI Provinsi Riau		Jumlah Agenda Pembinaan KORPRI	5 Agenda	955.075.520	
JUMLAH					16.953.962.760	JUMLAH					23.354.241.757

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan diusulkan pada dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau mengacu pada tugas pokok dan fungsi yaitu terkait administrasi kepegawaian, pengembangan, pembinaan dan evaluasi kinerja bagi Aparatur Sipil Negara. Sehingga berdasarkan dengan hal tersebut, tidak terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya, tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan andasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang termasuk di dalamnya dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, wajin memperhatikan kebijakan – kebijakan di tingkat pusat terutama dari Kementerian/Lembaga yang terkait dengan urusan administrasi dan pengembangan kompetensi kepegawaian.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau meliputi 3 (tiga) Kementerian/ Lembaga yaitu Kemepan - RB, Badan Kepegawaian Negara dan KASN.

3.1.1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Sebagai lembaga pembina aparatur sipil negara Kementerian PAN-RB memiliki **visi** “Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten untuk Mencapai Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi” dan **misi** “Penggerak Utama Reformasi Birokrasi”. Hal ini dicapai dengan tujuan strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien;
- b. Terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif;
- c. Terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan melayani;
- d. Mewujudkan aparatur yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta akuntabel;
- e. Mewujudkan aparatur Kementerian PAN-RB yang profesional dan berkinerja tinggi.

Tujuan strategi ini berusaha dicapai dengan strategi percepatan reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Penataan struktur birokrasi;
- b. Penataan jumlah, dan distribusi pegawai negeri sipil;
- c. Sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dan promosi Pegawai Negeri Sipil

secara terbuka

- d. Profesionalisasi Pegawai Negeri Sipil;
- e. Pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government)
- f. Peningkatan pelayanan publik;
- g. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur;
- h. Peningkatan kesejahteraan pegawai negeri;
- i. Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana Kerja Pegawai Negeri Sipil;

Beberapa hal yang dikemukakan di atas memberikan kesimpulan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara program Kementerian PAN-RB dengan program Badan Kepegawaian Daerah, yaitu Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur, dan Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara

3.1.2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Badan Kepegawaian Negara, disingkat BKN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. Visi yang ingin diwujudkan oleh BKN adalah ***“Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”***. Visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) misi, yaitu:

- a. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian;
- b. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
- c. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-undangan, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
- d. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Badan kepegawaian Negara Tahun 2015-2019 dalam hal kebijakan pembangunan di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut:

- a. Paradigma PNS sebagai aset, bukan expenses dan pelayanan masyarakat sebagai return (*value addedd to consumers*);
- b. Mengelola Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif;
- c. Membangun dan mengembangkan aliansi kerja sama dengan unit kepegawaian di setiap K/L dan Pemerintah Daerah untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Penerapan pengendalian pegawai ASN yang bersifat pencegahan (preventive) baik dalam penempatan pejabat ASN maupun dalam penegakan disiplin ;
- e. Pengintegrasian kinerja dengan kompensasi bagi pegawai ASN;
- f. Pendataan pegawai ASN secara handal dan terkini;
- g. Mengoptimalkan dukungan dan manajemen internal kepegawaian BKN.

Gambaran di atas memberikan arah dalam penyusunan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, dan Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya diturunkan ke dalam dokumen rencana kerja tahunan.

3.1.3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Lembaga Administrasi Negara yang disingkat LAN, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LAN bertugas untuk melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara serta pendidikan dan pelatihan untuk Pegawai Negeri Sipil.

Visi yang ingin diwujudkan LAN adalah ***“Menjadi Institusi yang Handal Dalam Pengembangan Sistem Administrasi Negara dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Negara”***. Sedangkan misi adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui:

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang administrasi negara;
- b. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan dalam bidang administrasi negara;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- d. Pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur negara;
- e. Perkonsultasian dan advokasi dalam bidang administrasi negara;
- f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi administrasi; Peningkatan kapasitas organisasi LAN.

Dengan mengacu pada rencana strategis LAN diketahui bahwa program dan kegiatan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, mempedomani pembinaan pelaksanaan pendidikan aparatur negara yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

3.1.4. Komisi Aparatur Sipil Negara

Komisi Aparatur Sipil Negara yang disingkat KASN merupakan lembaga independen yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertugas menjaga netralitas Pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

Visi yang ingin diwujudkan KASN adalah ***“Menjadi lembaga pengawas pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta sistem merit yang terpercaya dan berwibawa di Asia guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara***

profesional yang berkinerja tinggi, berintegritas dan netral". Sedangkan misi yang dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut adalah :

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan sistem merit dan nilai dasar kode etik serta kode perilaku pegawai pada semua instansi pemerintah di pusat dan daerah secara objektif, independen dan profesional; dan
- b. Menjaga netralitas pegawai ASN dan pelaksanaan fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa.

Sesuai dengan visi dan misi KASN untuk menjamin terwujudnya birokrasi Indonesia yang berdasarkan Sistem Merit, maka arah kebijakan yang ditempuh adalah :

- a. Membangun kesadaran dan pemahaman serta kepatuhan terhadap nilai dasar, kode etik dan kode perilaku;
- b. Menerapkan pengawasan yang efektif dan komprehensif terhadap pelaksanaan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku;
- c. Melakukan penanganan pengaduan secara cepat, tepat dan tuntas;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitasi secara adil, transparan dan menyeluruh;
- e. Melakukan kajian dan menyusun rekomendasi kebijakan dalam rangka penyempurnaan manajemen ASN; dan
- f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KASN.

Untuk melaksanakan arah kebijakan ini, strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. Melaksanakan promosi dan advokasi implementasi sistem merit dan pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku;
- b. Memprioritaskan pengawasan dan pemantauan pengisian JPT melalui seleksi terbuka di K/L dan Pemda;
- c. Memprioritaskan penanganan pengaduan dan penyelidikan untuk kasus yang berdampak luas;
- d. Membangun kerjasama lintas instansi terkait (BKN, Kemendagri, Bawaslu, Kemenpan & RB, APSC);
- e. Melakukan mediasi untuk meningkatkan tindak lanjut rekomendasi; dan
- f. Melakukan pengkajian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi manajemen ASN

Dengan mengacu pada rencana strategis KASN diketahui bahwa program dan kegiatan peningkatan program pembinaan dan pengembangan Aparatur dan program pelayanan administrasi aparatur sipil negara dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, mempedomani pembinaan pelaksanaan sistem merit yang ditetapkan oleh Komite Aparatur Sipil Negara.

3.1.5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Surat Edaran tentang Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah Tahun 2019 – 2020, menindaklanjuti pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Presiden tahun 2018, tentang Strategi Nasional, bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) yang ditetapkan Tim Nasional Pencegahan Korupsi (timnas PK), yang terdiri atas:

- a. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
- c. Menteri Dalam Negeri
- d. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- e. Kepala Staf Kepresidenan

Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 - 2020 terdiri dari 3 fokus dan 11 aksi. Pada fokus ke 3 (tiga) adalah penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan kriteria keberhasilan percepatan pelaksanaan sistem merit. Kebijakan nasional sistem merit merupakan salah satu fokus dari rencana aksi KPK, untuk penguatan reformasi birokrasi dan aksi pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.

Mengingat pentingnya sistem merit sebagai Kebijakan nasional dan rencana aksi KPK Tahun 2020, maka Pemerintah Provinsi Riau merespon kebijakan dimaksud pada penyelenggaraan pemerintah daerah, melalui program dan kegiatan yang akan disusun tidak hanya sampai tahun 2020 saja tetapi juga sampai implementasi sistem merit di Provinsi Riau benar – benar tercapai diharapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2019 - 2024.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun.

Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dalam konteks perencanaan lima tahunan dari 2019 s.d 2024. Adapun tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1.
Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian	
				2021	2022
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Profesionalisme ASN di Provinsi Riau		Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Riau	50	55
		1. Meningkatnya Manajemen Pelayanan ASN	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	66	67
		2. Meningkatnya Pembinaan dan Disiplin ASN	Presentase ASN Provinsi Riau yang mempunyai kinerja baik	75	80

Sumber: Renstra BKD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2021 sebagaimana telah disepakati dalam Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dengan mengacu pada Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Pada tahap penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 terdapat terdapat 5 program dan 51 kegiatan. Pada tahap rancangan akhir Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 terdiri dari 5 program dan 48 kegiatan. Pada tahapan akhir ini terdapat 3 kegiatan yang dilakukan pencermatan yaitu :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
3. Pengelolaan (LHKPN) Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau.

Berikut disajikan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang telah disesuaikan dengan rancangan akhir Rencana Kerja pada format TC.33 tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Riau

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.0.03.01.0.0.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik		100%	4.848.407.566	APBD Provinsi Riau		100%	6.447.601.888
3.0.03.01.0.0.00.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Pekanbaru	2.500 Surat	2.000.000			2.500 Surat	15.055.470
3.0.03.01.0.0.00.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayar		36 Rekening	849.000.000			36 Rekening	1.121.530.228
3.0.03.01.0.0.00.01.003.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		15 Unit	67.500.000			16 Unit	260.917.724
3.0.03.01.0.0.00.01.004.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	488.810.156			12 Bulan	810.917.724
3.0.03.01.0.0.00.01.006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		14 Unit	137.230.000			14 Unit	230.917.724
3.0.03.01.0.0.00.01.007.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang disediakan		26 Jenis	100.033.940			25 Jenis	196.784.624
3.0.03.01.0.0.00.01.008.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Laporan Yang Dicetak dan Digandakan		44 Jenis	102.250.000			25 Jenis	179.430.974
3.0.03.01.0.0.00.01.009.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		21 Jenis	125.623.500			31 Jenis	131.609.524
3.0.03.01.0.0.00.01.010.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		5.960 Porsi	150.000.000			6.400 Porsi	225.932.724
3.0.03.01.0.0.00.01.011.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah		137 Kali	925.002.000			160 Kali	860.917.724
3.0.03.01.0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa administrasi kantor		553 Orang Bulan	1.279.495.456			562 Orang Bulan	1.560.917.724
3.0.03.01.0.0.00.01.013.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan		276 Orang Bulan	621.462.514			276 Orang Bulan	852.669.724
3.0.03.01.0.0.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja		100%	239.400.000			100%	902.300.538
3.0.03.01.0.0.00.02.012.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara		1 Ruang	100.000.000			2 Ruang	702.300.538
3.0.03.01.0.0.00.02.016.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		311 Unit	139.400.000			311 Unit	200.000.000
3.0.03.01.0.0.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur		100%	-			100%	270.690.162
3.0.03.01.0.0.00.03.001.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		135 Stell	-			150 Orang	142.690.000
3.0.03.01.0.0.00.03.003.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		135 Stell	-			150 Orang	128.000.162
3.0.03.01.3.0.03.15.	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan		100%	2.620.093.128			100%	4.163.515.626

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.0.03.01.3.0.03.15.001.	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN	Jumlah Dokumen Renstra Pengadaan Kebutuhan ASN Provinsi Riau		1 Dokumen	67.178.511			1 Dokumen	126.166.733
3.0.03.01.3.0.03.15.002.	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update		2.500 Data Elektronik	54.364.703			2.500 Data Elektronik	120.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.003.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang direkrut		350 Orang	650.650.300			350 Orang	350.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.004.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah mahasiswa Ikatan Dinas yang difasilitasi		126 Orang	89.054.987			126 Orang	300.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.005.	Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang difasilitasi		145 Orang	38.752.217			200 Orang	100.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.007.	Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi	Jumlah dokumen penataan PNS		1 Dokumen	165.671.668			1 Dokumen	307.591.507
3.0.03.01.3.0.03.15.008.	Pengelolaan penataan PNS Pindah Tugas	Jumlah Dokumen Laporan Penataan PNS Pindah Tugas		1 Dokumen	87.820.670			1 Dokumen	160.628.502
3.0.03.01.3.0.03.15.009.	Penyusunan analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi	Jumlah Dokumen Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi yang tersusun		1 Dokumen	9.828.673			1 Dokumen	70.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.010.	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Evaluasi JFT		2 Dokumen	254.322.975			2 Dokumen	350.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.011.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah Dokumen seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		1 Dokumen	190.570.071			1 Dokumen	200.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.012.	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan		1 Sistem / Aplikasi / Modul	122.257.105			1 Sistem/Aplikasi/ Modul	200.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.013.	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Integrasi Sistem dan Jaringan yang dikelola		1 Modul	65.528.568			1 Modul	139.128.884
3.0.03.01.3.0.03.15.014.	Pengembangan Sistem Penilaian Kompetensi Provinsi Riau	Jumlah modul sistem penilaian kompetensi Provinsi Riau yang dikembangkan		1 Modul	101.883.850			1 Modul	150.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.016.	Pengelolaan Identitas dan Izin Kepegawaian	Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin kepegawaianya		350 Orang	12.068.398			350 Orang	200.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.017.	Pengelolaan kenaikan pangkat dan Penggunaan Gelar ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Jumlah berkas ASN yang dikelola		4000 Berkas	440.876.000			4000 Berkas	650.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.018.	Pengelolaan pensiun PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi		600 Orang	124.975.800			600 Orang	350.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.019.	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya		600 Orang	61.332.744			1000 Orang	120.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.020.	Pengelolaan (LHKPN) pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau	Jumlah Dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola		359 Dokumen	-			359 Dokumen	120.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.021.	Penanganan kasus - kasus kepegawaian dan Bantuan Hukum	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani		70 Kasus	82.955.888			70 Kasus	150.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase Jumlah Penataan Pengembangan Manajemen ASN Yang Profesional		100%	3.846.033.578			100%	6.935.806.766
3.0.03.01.3.0.03.17.001.	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen		2 Dokumen	47.000.000			2 Dokumen	70.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.002.	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau	Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan		1 Dokumen	50.892.149			1 Dokumen	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.0.03.01.3.0.03.17.003.	Pemetaan Jabatan, Evaluasi dan Penyusunan Talent Pool ASN Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pemetaan, Evaluasi dan Talent Pool		2 Dokumen	122.741.586			2 Dokumen	150.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.004.	Penyusunan Strategi Peningkatan Kompetensi	Jumlah dokumen strategi program dan kegiatan Peningkatan Kompetensi		1 Dokumen	214.428.320			- Dokumen	-
3.0.03.01.3.0.03.17.005.	Pemberian beasiswa tugas belajar	Jumlah PNS yang Terfasilitasi Mengikuti Tugas Belajar		33 Orang	1.825.476.450			78 Orang	4.000.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.006.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk I		1 Orang	167.603.344			1 Orang	81.483.600
3.0.03.01.3.0.03.17.007.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II		5 Orang	628.967.007			1 Orang	250.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.008.	Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Fungsional		15 Orang	130.750.000			15 Orang	250.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.009.	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis		8 Orang	111.383.000			45 Orang	222.693.386
3.0.03.01.3.0.03.17.010.	Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)	Jumlah PNS yang terseleksi mengikuti Diklat PIM Tk. II, III, dan IV		15 Orang	83.912.497			- Orang	-
3.0.03.01.3.0.03.17.011.	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assessor		20 Orang	85.648.000			20 Orang	846.808.000
3.0.03.01.3.0.03.17.012.	Pelaksanaan magang/praktik kerja	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan prktik kerja		2 Orang	86.659.156			10 Orang	257.686.680
3.0.03.01.3.0.03.17.013.	Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah ASN yang dikonseling		24 Orang	34.172.768			80 Orang	100.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.014.	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN		12 Kali	46.107.395			12 Kali	107.135.100
3.0.03.01.3.0.03.17.016.	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan berkinerja baik	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan		16 Orang	84.329.704			22 Orang	400.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.017.	Pembinaan KORPRI Provinsi Riau	Jumlah Agenda Pembinaan KORPRI		3 Agenda	125.962.202			5 Agenda	100.000.000
JUMLAH					11.553.934.272				18.719.914.980

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang bersifat teknis operasional, Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan dokumen pembangunan daerah Provinsi Riau yang tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan prosedur dan tahapan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, maka rumusan rencana kerja dan pendanaan yang terdiri atas program, kegiatan, indikator dan target capaian serta pagu indikatif Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 dan perkiraan maju Tahun dirumuskan kembali dalam format TC. 33 tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tahun 2021

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.0.03.01.0.0.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik		100%	4.848.407.566	APBD Provinsi Riau		100%	6.447.601.888
3.0.03.01.0.0.00.01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Pekanbaru	2.500 Surat	2.000.000			2.500 Surat	15.055.470
3.0.03.01.0.0.00.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayar		36 Rekening	849.000.000			36 Rekening	1.121.530.228
3.0.03.01.0.0.00.01.003	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		15 Unit	67.500.000			16 Unit	260.917.724
3.0.03.01.0.0.00.01.004	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor		12 Bulan	488.810.156			12 Bulan	810.917.724
3.0.03.01.0.0.00.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara		14 Unit	137.230.000			14 Unit	230.917.724
3.0.03.01.0.0.00.01.007	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang disediakan		26 Jenis	100.033.940			25 Jenis	196.784.624
3.0.03.01.0.0.00.01.008	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Laporan Yang Dicitak dan Digandakan		44 Jenis	102.250.000			25 Jenis	179.430.974
3.0.03.01.0.0.00.01.009	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		21 Jenis	125.623.500			31 Jenis	131.609.524
3.0.03.01.0.0.00.01.010	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan		5.960 Porsi	150.000.000			6.400 Porsi	225.932.724
3.0.03.01.0.0.00.01.011	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah		137 Kali	925.002.000			160 Kali	860.917.724
3.0.03.01.0.0.00.01.012	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa administrasi kantor		553 Orang Bulan	1.279.495.456			562 Orang Bulan	1.560.917.724
3.0.03.01.0.0.00.01.013	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan		276 Orang Bulan	621.462.514			276 Orang Bulan	852.669.724
3.0.03.01.0.0.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja		100%	239.400.000			100%	902.300.538
3.0.03.01.0.0.00.02.012	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara		1 Ruang	100.000.000			2 Ruang	702.300.538
3.0.03.01.0.0.00.02.016	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		311 Unit	139.400.000			311 Unit	200.000.000
3.0.03.01.0.0.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur		100%	-			100%	270.690.162
3.0.03.01.0.0.00.03.001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan		135 Stell	-			150 Orang	142.690.000
3.0.03.01.0.0.00.03.003	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		135 Stell	-			150 Orang	128.000.162

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.0.03.01.3.0.03.15.	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase pelayanan manajemen ASN yang terselesaikan		100%	2.620.093.128			100%	4.163.515.626
3.0.03.01.3.0.03.15.001.	Penyusunan Dokumen Kebutuhan dan Formasi ASN	Jumlah Dokumen Renstra Pengadaan Kebutuhan ASN Provinsi Riau		1 Dokumen	67.178.511			1 Dokumen	126.166.733
3.0.03.01.3.0.03.15.002.	Pengelolaan data kepegawaian	Jumlah data elektronik ASN yang dikelola secara update		2.500 Data Elektronik	54.364.703			2500 Data Elektronik	120.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.003.	Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah ASN yang direkrut		350 Orang	650.650.300			350 Orang	350.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.004.	Penunjang Pendidikan Ikatan Dinas	Jumlah mahasiswa Ikatan Dinas yang difasilitasi		126 Orang	89.054.987			126 Orang	300.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.005.	Pengelolaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang difasilitasi		145 Orang	38.752.217			200 Orang	100.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.007.	Penataan PNS dalam Jabatan JPT dan Administrasi	Jumlah dokumen penataan PNS		1 Dokumen	165.671.668			1 Dokumen	307.591.507
3.0.03.01.3.0.03.15.008.	Pengelolaan penataan PNS Pindah Tugas	Jumlah Dokumen Laporan Penataan PNS Pindah Tugas		1 Dokumen	87.820.670			1 Dokumen	160.628.502
3.0.03.01.3.0.03.15.009.	Penyusunan analisis evaluasi mutasi, rotasi dan promosi	Jumlah Dokumen Analisis Evaluasi Mutasi, Rotasi dan Promosi yang tersusun		1 Dokumen	9.828.673			1 Dokumen	70.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.010.	Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Tertentu Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Evaluasi JFT		2 Dokumen	254.322.975			2 Dokumen	350.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.011.	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah Dokumen seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		1 Dokumen	190.570.071			1 Dokumen	200.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.012.	Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian Provinsi Riau	Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan		1 Sistem / Aplikasi / Modul	122.257.105			1 Sistem/Aplikasi/Modul	200.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.013.	Integrasi Sistem dan Pengelolaan Jaringan Pelayanan Kepegawaian	Jumlah Integrasi Sistem dan Jaringan yang dikelola		1 Modul	65.528.568			1 Modul	139.128.884
3.0.03.01.3.0.03.15.014.	Pengembangan Sistem Penilaian Kompetensi Provinsi Riau	Jumlah modul sistem penilaian kompetensi Provinsi Riau yang dikembangkan		1 Modul	101.883.850			1 Modul	150.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.016.	Pengelolaan Identitas dan Izin Kepegawaian	Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin kepegawaianya		350 Orang	12.068.398			350 Orang	200.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.017.	Pengelolaan kenaikan pangkat dan Penggunaan Gelar ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kab/Kota se Provinsi Riau	Jumlah berkas ASN yang dikelola		4000 Berkas	440.876.000			4000 Berkas	650.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.018.	Pengelolaan pensiun PNS	Jumlah PNS yang difasilitasi		600 Orang	124.975.800			600 Orang	350.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.019.	Pengelolaan Satya Lencana Karya Satya	Jumlah PNS yang menerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya		600 Orang	61.332.744			1000 Orang	120.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.020.	Pengelolaan (LHKPN) pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara Provinsi Riau	Jumlah Dokumen LHKPN Provinsi Riau yang dikelola		359 Dokumen	-			359 Dokumen	120.000.000
3.0.03.01.3.0.03.15.021.	Penanganan kasus - kasus kepegawaian dan Bantuan Hukum	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani		70 Kasus	82.955.888			70 Kasus	150.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase Jumlah Penataan Pengembangan Manajemen ASN Yang Profesional		100%	3.846.033.578			100%	6.935.806.766
3.0.03.01.3.0.03.17.001.	Penyelenggaraan Penilaian dan Analisis Kesenjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau	Jumlah dokumen		2 Dokumen	47.000.000			2 Dokumen	70.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.0.03.01.3.0.03.17.002.	Penyusunan Standar Kompetensi PNS Provinsi Riau	Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan		1 Dokumen	50.892.149			1 Dokumen	100.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.003.	Pemetaan Jabatan, Evaluasi dan Penyusunan Talent Pool ASN Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pemetaan, Evaluasi dan Talent Pool		2 Dokumen	122.741.586			2 Dokumen	150.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.004.	Penyusunan Strategi Peningkatan Kompetensi	Jumlah dokumen strategi program dan kegiatan Peningkatan Kompetensi		1 Dokumen	214.428.320			- Dokumen	-
3.0.03.01.3.0.03.17.005.	Pemberian beasiswa tugas belajar	Jumlah PNS yang Terfasilitasi Mengikuti Tugas Belajar		33 Orang	1.825.476.450			78 Orang	4.000.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.006.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM I)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk I		1 Orang	167.603.344			1 Orang	81.483.600
3.0.03.01.3.0.03.17.007.	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (PIM II)	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II		5 Orang	628.967.007			1 Orang	250.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.008.	Diklat fungsional bagi pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Diklat Fungsional		15 Orang	130.750.000			15 Orang	250.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.009.	Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis		8 Orang	111.383.000			45 Orang	222.693.386
3.0.03.01.3.0.03.17.010.	Seleksi diklat kepemimpinan (PIM 2,3,4)	Jumlah PNS yang terseleksi mengikuti Diklat PIM Tk. II, III, dan IV		15 Orang	83.912.497			- Orang	-
3.0.03.01.3.0.03.17.011.	Penyelenggaraan peningkatan kapasitas asesor Provinsi Riau	Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assessor		20 Orang	85.648.000			20 Orang	846.808.000
3.0.03.01.3.0.03.17.012.	Pelaksanaan magang/praktik kerja	Jumlah ASN yang terfasilitasi mengikuti magang dan prktik kerja		2 Orang	86.659.156			10 Orang	257.686.680
3.0.03.01.3.0.03.17.013.	Pelaksanaan Konseling bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah ASN yang dikonseling		24 Orang	34.172.768			80 Orang	100.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.014.	Penegakan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN	Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN		12 Kali	46.107.395			12 Kali	107.135.100
3.0.03.01.3.0.03.17.016.	Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi dan berkinerja baik	Jumlah PNS berprestasi dan berkinerja baik yang menerima penghargaan		16 Orang	84.329.704			22 Orang	400.000.000
3.0.03.01.3.0.03.17.017.	Pembinaan KORPRI Provinsi Riau	Jumlah Agenda Pembinaan KORPRI		3 Agenda	125.962.202			5 Agenda	100.000.000
JUMLAH					11.553.934.272				18.719.914.980

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	03				KEPEGAWAIAN								31,601,447,484			60,073,389,047		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								25,135,320,778			52,637,343,338		
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan								20,047,513,212			22,052,264,533		
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ASN	Meningkatnya pelaporan keuangan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	116 Orang	100 Persen	20,047,513,212	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	22,052,264,533
5	03	01	1.03		Administrasi Umum								5,087,807,566			30,585,078,805		
5	03	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Surat yang Dikirim	Meningkatnya kinerja ASN	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2500 Surat	100 Persen	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	2,300,000
5	03	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah rekening yang dibayar	Meningkatnya kinerja ASN	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	36 Rekening	100 Persen	849,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	976,350,000
5	03	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Meningkatnya kinerja ASN	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	15 Unit	100 Persen	67,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	77,625,000
5	03	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Meningkatnya kinerja ASN	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	14 unit	100 Persen	137,230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	157,814,500
5	03	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan Jumlah tenaga satpam yang disediakan	Meningkatnya kinerja ASN	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	562 Ob 276 Ob	100 Persen	1,900,957,970	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	21,861,016,655
5	03	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kinerja ASN	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Bulan	100 Persen	488,810,156	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	5,621,316,794
5	03	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Meningkatnya kinerja ASN	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	26 Jenis	100 Persen	100,033,940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	115,039,031

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	Meningkatnya kinerja ASN	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	44 Jenis	100 Persen	102,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	117,587,500
5	03	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Meningkatnya kinerja ASN	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	21 Jenis	100 Persen	125,623,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	144,467,025
5	03	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Meningkatnya kinerja ASN	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5960 Porsi	100 Persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	172,500,000
5	03	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Meningkatnya kinerja ASN	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	137 Kali	100 Persen	925,002,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1,063,752,300
5	03	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	Meningkatnya kinerja ASN	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Ruang	100 Persen	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	115,000,000
5	03	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Meningkatnya kinerja ASN	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	311 Unit	100 Persen	139,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	160,310,000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								6,466,126,706				7,436,045,709	
5	03	02	1.01		Pengelolaan Data dan Informasi ASN								254,218,774				292,351,590	
5	03	02	1.01	01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah modul/fitur/perangkat manajemen kepegawaian yang dikembangkan	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi ASN Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Sistem	100 Persen	122,257,105	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	140,595,671
5	03	02	1.01	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi ASN Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Sistem	100 Persen	65,528,568	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	75,357,853

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	1.01	04	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah ASN yang dikelola identitas dan izin kepegawaiannya Jumlah data elektronik ASN yang terkelola secara update	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi ASN Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	350 Orang 2500 Data elektronik	100 Persen	66,433,101	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	76,398,066
5	03	02	1.02		Administrasi Kepegawaian							1,737,571,693				1,998,207,447		
5	03	02	1.02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah ASN yang direkrut Jumlah Dokumen Renstra Pengadaan Kebutuhan ASN Provinsi Riau	Terlaksananya administrasi kepegawaian ASN Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	350 Orang 1 Dokumen	100 Persen	717,828,811	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	825,503,133
5	03	02	1.02	02	Penataan dan Mutasi Jabatan	Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah laporan pelaksanaan pindah tugas dan penataan mutasi ASN	Terlaksananya administrasi kepegawaian ASN Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	97,649,343	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	112,296,744
5	03	02	1.02	04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah PNS yang difasilitasi	Terlaksananya administrasi kepegawaian ASN Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	600 Orang	100 Persen	124,975,800	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	143,722,170
5	03	02	1.02	08	Pengelolaan Penempatan Dalam Jabatan ASN	Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah dokumen penataan PNS dalam jabatan JPT dan Adminstrasi Jumlah Dokumen seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	Terlaksananya administrasi kepegawaian ASN Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	356,241,739	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	409,678,000
5	03	02	1.02	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	Jumlah berkas kenaikan pangkat dan penggunaan gelar ASN yang dikelola	Terlaksananya administrasi kepegawaian ASN Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	4000 Berkas	100 Persen	440,876,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelayanan ASN yang terselesaikan	100 Persen	507,007,400
5	03	02	1.03		Peningkatan Kapasitas ASN							3,991,804,005				4,590,574,604		
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas ASN	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah dokumen strategi Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas ASN	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN di Provinsi Riau	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	214,428,320	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	100 Persen	246,592,568
5	03	02	1.03	02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah dokumen hasil analisis Penilaian Kinerja ASN	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN di Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	47,000,000			Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	100 Persen	54,050,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	1.03	03	Pengembangan Assessment Center	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah Dokumen Pengembangan Assessment Center Jumlah PNS yang mengikuti peningkatan kompetensi assessor	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN di Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen 20 Orang	100 Persen	187,531,850	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	100 Persen	215,661,627
5	03	02	1.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah Agenda Pembinaan KORPRI	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN di Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Agenda	100 Persen	125,962,202	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	100 Persen	144,856,532
5	03	02	1.03	06	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah PNS yang terfasilitasi mengikuti diklat manajerial, teknis, fungsional.	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN di Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	44 Orang	100 Persen	1,122,615,848	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	100 Persen	1,291,008,225
5	03	02	1.03	07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Jumlah PNS yang Terfasilitasi Mengikuti Tugas Belajar	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN di Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	145 Orang 33 Orang	100 Persen	1,864,228,667	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	100 Persen	2,143,862,967
5	03	02	1.03	08	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah mahasiswa pendidikan ikatan dinas yang difasilitasi	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN di Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	126 Orang	100 Persen	175,714,143	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	100 Persen	202,071,264
5	03	02	1.03	09	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Evaluasi JFT	Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN di Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	254,322,975	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	100 Persen	292,471,421
5	03	02	1.04		Pengembangan Karir ASN							173,633,735					199,678,795	
5	03	02	1.04	02	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah dokumen pola karier ASN Provinsi Riau yang tersedia Jumlah dokumen standar kompetensi PNS Provinsi Riau yang terselesaikan	Terlaksananya pengembangan karir ASN di Provinsi Riau	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen 1 Dokumen	100 Persen	173,633,735	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	100 Persen	199,678,795
5	03	02	1.05		Pembinaan ASN							308,898,499					355,233,273	
5	03	02	1.05	01	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan konseling	Terlaksananya pembinaan ASN di Provinsi Riau	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Orang	100 Persen	34,172,768	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	100 Persen	39,298,683

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	03	02	1.05	02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah kasus-kasus kepegawaian yang ditangani	Terlaksananya pembinaan ASN di Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	70 kasus	100 Persen	82,955,888	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	100 Persen	95,399,271
5	03	02	1.05	03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN Jumlah PNS yang menerima penghargaan atas prestasi dan pengabdian	Terlaksananya pembinaan ASN di Provinsi Riau	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen 616 Orang	100 Persen	191,769,843	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembinaan dan pengembangan aparatur	100 Persen	220,535,319
TOTAL														31,601,447,484		60,073,389,047		

BAB V PENUTUP

Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 ini disusun dengan berkoordinasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau.

Dengan disusunnya dokumen renja ini diharapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada Tahun 2021 dapat berjalan secara lebih terarah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Riau serta tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 dan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2019 – 2024.

Demikianlah Renja Badan Kepegawaian daerah Provinsi Riau Tahun 2021 disusun sebagai acuan dalam merumuskan program dan kegiatan Tahun 2021.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**



IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650904 199703 1 001